



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 785/VIII/2013

IV/AGUSTUS 2013



HUT ke-68 DPR Sebagai Momentum Refleksi

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id dan tvparlemen.com

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT AGUSTUS 2013

Minggu keempat bulan Agustus ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 27 Agustus 2013, dan juga pelantikan PAW. Pada minggu ini pula, DPR memperingati HUT yang ke-68. Berikut rangkumannya:

Rapat Paripurna 27 Agustus 2013

Rapat Paripurna 27 Agustus, memiliki tiga agenda, yaitu: [1] Laporan Pimpinan Komisi I DPR-RI mengenai persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan calon Panglima TNI, dilanjutkan pengambilan keputusan; [2] tanggapan Pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang APBN tahun anggaran 2014; dan [3] penetapan susunan keanggotaan Fraksi dalam Komisi di badan anggaran.

Pada agenda pertama tentang Pemberhentian dan pengangkatan Calon Panglima TNI, disampaikan laporan oleh Ketua Komisi I, bahwa *fit and proper test* dilakukan terhadap Jenderal TNI Moeldoko. Penyampaian visi dan misi oleh calon Panglima TNI ini antara lain berkisar tentang, inovasi sistem manajemen TNI yang lebih terintegrasi, profesionalisme TNI dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dilanjutkan dengan tanya-jawab/dialog terkait visi dan misi calon panglima. Setelah pelaksanaan *fit and proper test*, Komisi I menyelenggarakan rapat intern membahas hasil *fit and proper test*, dan memutuskan: pertama, menyetujui pemberhentian Laksamana TNI Agus Suhartono, SE sebagai Panglima TNI. Komisi I memberikan apresiasi atas capaian-capaian dan penilaian positif terhadap kinerja Panglima TNI selama ini. Kedua, memberikan persetujuan pengangkatan Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI secara musyawarah mufakat, sesuai Tata Tertib DPR Pasal 272 ayat (1) dan (2).

Atas laporan Komisi I ini, Rapat Paripurna memberikan persetujuannya, dan mengharapkan bahwa persetujuan ini memerlukan dukungan kebijakan politik yang terus menerus dari DPR maupun Pemerintah, untuk membangun TNI yang tangguh dan profesional.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



Agenda kedua, tentang tanggapan Pemerintah atas pandangan Fraksi-Fraksi, Pemerintah menyampaikan intinya: pertama, RAPBN 2014 menempati posisi strategis, karena merupakan instrumen kebijakan fiskal dari momentum terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Oleh karena itu, Rencana Strategis dan Kebijakan Umum RAPBN 2014, secara tidak langsung mencerminkan kelanjutan dari proses pelaksanaan pembangunan nasional dalam empat tahun terakhir. Kedua, visi RPJPN 2010-2014 untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, demokratis dan berkeadilan, terus diupayakan pencapaiannya melalui berbagai target dan sasaran utama serta berbagai prioritas. Upaya ke arah ini dilakukan melalui pelaksanaan empat strategis utama, yaitu pembangunan yang pro-pertumbuhan, pro-lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, serta ramah lingkungan.

Ketiga, sebagai dasar dalam penyusunan RAPBN 2014, RKP 2014 yang mengusung tema “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Lebih Berkeadilan”, lebih menekankan kepada pemantapan perekonomian nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemeliharaan sosial politik.

Keempat, Untuk menjawab perkembangan ekonomi global, Pemerintah telah menyiapkan langkah kebijakan anti-sipasi terhadap krisis yang mungkin terjadi, terutama untuk menghindarkan Indonesia dari *middle income trap*, dengan memperkokoh perekonomian Indonesia, agar kesinambungan pembangunan ekonomi dapat tetap terjaga. Juga mempertahankan daya beli dan penguatan pasar domestik dan langkah *keep buying* strategi dengan penyiapan paket stimulus, untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja dan upaya ekstra untuk mengendalikan inflasi, agar



daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga.

Kelima, Pemerintah juga menganggarkan sejumlah dana resiko fiskal sebagai langkah antisipasi, apabila asumsi ekonomi makro berbeda dengan realisasinya, dan tidak dapat dilaksanakannya langkah-langkah kebijakan seperti yang direncanakan, yang dapat berpengaruh negatif terhadap RAPBN 2014.

Keenam, pandangan fraksi-fraksi terhadap masalah pengendalian inflasi, Pemerintah menjelaskan bahwa, pada prinsipnya laju inflasi memang perlu dijaga pada level yang rendah dan stabil dalam jangka panjang. Laju inflasi yang rendah dan stabil, memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam RAPBN 2014, Pemerintah mengusulkan asumsi laju inflasi pada titik tengah dan rentang sasaran inflasi yang ditetapkan yaitu 4,5 persen \pm 1 persen, seiring meredanya tekanan yang bersumber dari harga pangan dan energi, baik di pasar internasional maupun domestik, serta relatif terbatasnya harga yang akan ditetapkan. Namun demikian, pemerintah tetap mengajak Dewan untuk mengkaji ulang mengenai asumsi laju inflasi yang telah disepakati bersama dalam pembicaraan pendauluan RAPBN 2014, mengingat adanya perkembangan terkini dari kondisi ekonomi global.

Ketujuh, dalam rangka mengendalikan laju inflasi, Pemerintah sependapat perlunya sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. Pemerintah dan BI terus berupaya meningkatkan koordinasi, dalam hal ini, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Kedelapan, atas pertanyaan berbagai Fraksi mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, dijelaskan bahwa: [1] pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang belum menentu karena berlarutnya penyelesaian krisis di kawasan Eropa. Dalam sistem ekonomi terbuka yang dianut Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global. Negara maju maupun berkembang telah melakukan revisi kebawah terhadap proyeksi pertumbuhan ekonominya untuk 2014, merespon ekonomi global yang masih melambat. Perekonomian dunia 2014 diperkirakan masih belum kuat tumbuh 3,5% (yoy), lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 3,8%. Sejalan dengan itu, harga komoditi dunia juga belum tinggi, sehingga ekspor meskipun diperkirakan lebih tinggi dari 2013, belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Oleh karenanya, dengan mencermati perkembangan perekonomian, baik global maupun domestik, dan analisis *outlook* satu tahun kedepan, maka target pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dalam APBN-P 2013 sebesar 6,4% perlu dikoreksi ke bawah dan perlu kerja keras dengan berbagai langkah kebijakan penyesuaian.

Agenda ketiga rapat paripurna 27 Agustus, tentang penetapan susunan keanggotaan Fraksi di Badan Anggaran, masih berlangsung. Masing-masing Fraksi telah menyampaikan nama-nama anggotanya yang selanjutnya akan dituangkan dalam surat keputusan DPR RI.

Pelantikan PAW

Ketua DPR melantik 1 orang anggota Pengganti Antar

Waktu (PAW) di *Operation Room* Gedung DPR, Selasa (27/8), yaitu Marcus Silanno, SIP dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur II menggantikan H. Suhartono Wijaya, SE MBA.

HUT DPR-RI

Kegiatan DPR minggu ini adalah peringatan HUT DPR ke-68 dengan Pidato Ketua DPR dalam Sidang Paripurna. Dalam pidato, Ketua DPR menyampaikan *flash-back* perjalanan dinamika parlemen di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dinamika DPR pada periode ke 18, yaitu periode hasil Pemilu 2009. Selanjutnya dilaporkan mengenai kinerja DPR dalam mengemban fungsi di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, berikut tantangan dan upaya ke depan yang perlu ditangani. Tema Peringatan Hari Ulang Tahun MPR/DPR-RI tahun ini adalah “Menjawab Tantangan, Meningkatkan Kepercayaan”. Tema ini sejalan dengan visi DPR-RI yang telah ditetapkan melalui Renstra DPR-RI 2010-2014, yaitu: “terwujudnya DPR-RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur”, sebuah visi yang mengacu pada tuntutan kinerja pelaksanaan tugas-tugas pokok lembaga dengan berbagai potensi dan kendala yang dihadapi.

Selain itu, dilaporkan mengenai tugas-tugas lain yang ditangani selama satu tahun sidang, 2012-2013, tentang penetapan pejabat publik dan pemberian pertimbangan terhadap calon Duta Besar Negara Sahabat untuk Republik Indonesia. Dilaporkan juga mengenai upaya penguatan kelembagaan yang dilakukan sejak awal periode dengan penetapan Renstra DPR-RI.

Renstra yang dicanangkan merupakan fondasi yang secara prinsip mengacu pada tuntutan kinerja, tugas pokok lembaga, mengakomodasi potensi dan meminimalisir kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas. Renstra merupakan pedoman kerja strategis untuk 5 tahun ke depan untuk setiap entitas di lembaga DPR. Sasaran dari pembenahan internal lembaga DPR RI adalah terwujudnya pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI yang lebih efektif dan efisien dengan didukung oleh sistem pendukung DPR RI yang lebih profesional dan sesuai dengan kebutuhan guna mendorong kinerja DPR RI yang lebih baik. Harapannya melalui pembenahan ini DPR RI dapat menjawab tantangan untuk dapat melaksanakan amanat rakyat yang sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

Dalam rangkaian HUT DPR RI ke-68, diadakan berbagai kegiatan di antaranya adalah (1) Pameran foto jurnalistik karya pewarta foto parlemen yang merupakan peristiwa, kiprah dan kegiatan yang dilaksanakan DPR selama kurun waktu 1 tahun dengan tema “Warna-Warni Parlemen 2013”; (2) Pada hari ini dilakukan donor daerah, kerja sama dengan KSSD-PI (Keluarga Sehat Donor Darah Parlemen Indonesia), yang diikuti anggota DPR, DPD, karyawan dan masyarakat umum; (3) Akan dipentaskan pagelaran wayang semalam suntuk dengan lakon “Semar Boyong” dengan Dalang Ki H. Anom Suroto pada tanggal 31 Agustus 2013; (4) Akan diselenggarakan kegiatan bersepeda bersama masyarakat umum dengan tema “Sepeda Sehat Senayan 2013” yang dilaksanakan tanggal 15 September 2013. **



HUT ke -68 DPR Sebagai Momentum Refleksi

Hari ini, Kamis, 29 Agustus 2013, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-68. Di usia yang lebih dari setengah abad ini, DPR telah melewati berbagai tantangan, di tengah krisisnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, salah satunya DPR.

“Acara peringatan ini kiranya dapat kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan refleksi, evaluasi atas dinamika kinerja, dan langkah serta kiprah kita sebagai anggota lembaga legislatif yang merupakan cerminan representasi rakyat Indonesia,” kata Ketua DPR Marzuki Alie saat membacakan pidato pada RapatParipurna, Gedung Nusantara II, Kamis (29/8).

Marzuki menambahkan, dalam kurun waktu 68 tahun sejak terbentuknya lembaga perwakilan rakyat secara formal di Indonesia, proses demokrasi yang berkembang, telah berkembang secara dinamis. Pada usia yang mendekati tujuh dasawarsaini, tambah Marzuki, sudah menjadi kewajiban setiap wakil rakyat wajib untuk berjuang melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa.

Peringatan HUT ke-68 MPR/DPR kali ini mengusung tema “Memantapkan Tantangan, Meningkatkan Kepercayaan”. Marzuki yakin, DPR telah menunjukkan dinamika yang sangat baik dalam mengartikulasi dan mengagregasi aspirasi dan kepentingan rakyat, melalui pelaksanaan tiga fungsi DPR.

“Kami memandang tingkat kepercayaan rakyat sangat penting. Sebab, kepercayaan rakyat dapat menstimulasi dan memacu kerja wakil rakyat untuk bekerja lebih efektif, aspiratif, produktif, dan bertanggung jawab,” imbuh politisi Partai Demokrat ini.

Marzuki menyatakan tema ulang tahun DPR sejalan dengan visi DPR yang telah ditetapkan melalui Renstra DPR 2010-2014. Yaitu: Terwujudnya DPR sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Visi ini, tambah Marzuki, mengacu pada tuntutan kinerja pelaksanaan tugas-tugas pokok lembaga dengan berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi.

Usai Rapat Paripurna, acara dilanjutkan potong tumpeng di lobby ruang rapat. Potongan nasi tumpeng diberikan langsung oleh Marzuki kepada segenap pimpinan DPR dan MPR. (sf)/foto: wahyu/parle.

Setiap Rupiah Harus Dipertanggungjawabkan

Menyambut HUT DPR ke-68 tahun, fungsi anggaran terus bekerja intensif dalam menyusun RAPBN. Dan yang paling krusial, setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, melalui para wakilnya di DPR RI.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR pada peringatan HUT ke-68 MPR/DPR RI, Kamis (29/8). Fungsi anggaran ini dijalankan Badan Anggaran (Banggar) seperti diamanatkan pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Selain itu, Marzuki juga menegaskan, landasan hukum DPR dalam menjalankan fungsi anggaran adalah UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

Landasan hukum lainnya bagi Anggaran DPR adalah UU No.27/2009 ten-

tang MD3 dan peraturan Tata Tertib DPR RI. "Sesuai dengan siklus anggaran, awal tahun sidang 2012-2013, DPR telah melakukan pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2013, penyusunan RAPBN tahun 2014, dan Rancangan Kerja Pemerintah tahun 2014, serta Laporan Semester I dan prognosis semester II APBN Tahun Anggaran 2013," jelas Marzuki.

Fungsi anggaran DPR ini, lanjut Marzuki, tidak saja untuk mewujudkan *check and balance*, tapi juga ingin menegaskan kepada publik bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah harus selalu mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Namun demikian, DPR menyadari masih terdapat kendala dari kebijakan fiskal.

"Idealnya adalah bahwa DPR mempelajari dan memahami "cost and ben-



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

efit" dari setiap kebijakan fiskal yang akan diambil pemerintah, terutama kebijakan fiskal yang menyangkut kepentingan masyarakat," jelas Marzuki. (mh)/foto:iw/parle/iw.

Ketua DPR Terima Audit Investigasi Hambalang



Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat menerima laporan audit investigasi proyek Hambalang tahap II dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo.

Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima laporan audit investigasi proyek Hambalang tahap II dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo, Jumat (23/8). Ini laporan yang sangat dinanti publik.

Banyak temuan penyimpangan dan penyalahgunaan

wewenang yang disampaikan Ketua BPK dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi X, dan Pimpinan BAKN DPR. Hanya saja baik Ketua BPK maupun Ketua DPR tidak bisa secara rinci menyampaikan isi laporan audit tersebut, karena menyangkut rahasia negara.

Bila selama ini ada keterlambatan penyerahan hasil audit, kata Marzuki, itu lebih karena BPK sangat berhati-hati menyusun laporannya, sehingga tidak ada salah tafsir. Dalam laporan tahap kedua ini, berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang tersebut banyak dilakukan instansi-instansi terkait. Selain itu ada pula rekayasa akuntansi yang dilakukan.

Kerugian negara dalam audit tahap kedua tersebut mencapai Rp 463,67 miliar. Fakta ini disampaikan langsung Ketua BPK yang didampingi Wakil Ketua BPK Ali Maskur Musa. Disebutkan pula fakta-fakta penyimpangan lain, misalnya, Menpora tidak membuat studi kelayakan amdal terlebih dahulu, sehingga bangunan *sport center* ini tidak memenuhi persyaratan.

Lokasi proyek Hambalang, ungkap Ketua BPK, berada di kerawanan longsor. Bila bertemu dengan air, tanahnya

mudah hancur. Ini mengindikasikan banyak rekayasa dalam mega proyek Hambalang. Hampir secara keseluruhan, bangunan yang diorientasikan sebagai Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) ini, tidak bisa digunakan sama sekali.

Bangunan sport center di Hambalang, kata Ketua BPK,

tidak layak untuk dilanjutkan. Akhirnya, uang negara yang sudah dikeluarkan untuk membangun proyek ini pun tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Ketua DPR Marzuki Alie hanya berkomentar singkat bahwa hasil laporan audit ini tidak ada intervensi sama sekali. Isinya bukan untuk konsumsi publik. Apalagi, Ketua BPK juga ingin menyerahkan hasil audit ke KPK. (mh)foto:wahyu/parle

DPR Desak PNRI Percepat Penyerapan Anggaran

Komisi X menilai realisasi anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Tahun Anggaran 2013 belum optimal dan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Realisasi anggaran PNRI tahun anggaran tahun 2013 sampai bulan Agustus masih sebesar Rp 124 miliar, atau hanya 25,96% dari pagu APBN TA 2013 sebesar Rp 479 miliar.

“Oleh karena itu, Komisi X mendesak PNRI untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, agar realisasi anggaran PNRI TA 2013 dapat optimal,” jelas Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto saat memimpin RDP antara Komisi X dengan PNRI di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senin (26/8).

Hal senada diungkapkan oleh Ang-



Anggota Komisi X DPR Muslim.

gota Komisi X Muslim. Ia menilai serapan anggaran PNRI masih tergolong rendah, sehingga pihaknya akan mendorong PNRI untuk memaksimalkan anggaran yang ada.

“PNRI sebagai salah satu mitra Komisi X yang sangat hati-hati dalam hal anggaran. Kita mendesak agar penyerapan anggaran ini jangan ter-

hambat. Yang paling utama adalah realisasi program-program yang terkait kepentingan masyarakat,” ujar politisi Demokrat ini.

Menanggapi hal ini, Kepala PNRI Sri Sularsih memaparkan akan membentuk Pokja atau Tim Percepatan Daya Serap Anggaran di masing-masing unit kerja. Selain itu, Unit Layanan Pengadaan akan segera melakukan pemetaan dan penjadwalan terhadap pengadaan barang dan jasa yang lelangnya belum dilaksanakan.

Selain membahas APBN 2013, Komisi X juga menyepakati akan melakukan RDP dalam waktu dekat untuk membahas anggaran PNRI yang diblokir. Anggaran ini terkait biaya pembangunan gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional sebesar Rp. 92 miliar dalam APBN 2013. (sf), foto : od/parle/hr.

Swasembada Pangan Belum Menjadi Gerakan Politik Masif



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan bahwa Program Swasembada Pangan belum menjadi gerakan politik masif, sehingga dapat menimbulkan kegairahan rakyat untuk dapat memenuhi yang diharapkan pemerintah.

“Saya tidak melihat bahwa ini (Program Swasembada Pangan) menjadi gerakan masif yang dilakukan pemerintah,” kata Pramono Anung, setelah menetapkan Pimpinan Komisi IV di gedung DPR, (26/8).

Contohnya Indonesia sebagai negara agraris yang tanahnya subur namun persoalan cabe saja masih impor, dan banyak hal lainnya termasuk beras dan daging sapi. “Siapa saja bisa, ketika waktu kita kesulitan daging solusi yang paling gampang mengimpor,” jelasnya.

Pramono Anung menegaskan bahwa ini merupakan pilihan, pilihan untuk memilih bahwa kemandirian itu menjadi kata kunci dari sebuah pemerintahan yang sekarang ini ada, jangan kalau sedang menghadapi kesulitan semuanya impor. “Ini adalah pilihan kebijakan menuruti kapitalisme pasar atau ada keinginan mandiri secara ekonomi,” tegasnya

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, program swasembada pangan lebih pada program yang diucapkannya enak dan menarik, tetapi kenyataannya secara *political will* dalam penganggaran tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. “Harusnya negara yang mempunyai tingkat kesuburan yang seperti ini seharusnya bisa lebih mandiri,” kata Pramono Anung. (as) foto:wahyu/parle

Pimpinan DPR Kembali Kukuhkan Beberapa Pimpinan Komisi

Airlangga Hartarto (F-PG) dipercaya kembali memimpin Komisi VI DPR RI untuk periode 2013-2014. Penetapan Pimpinan Komisi VI ini dikukuhkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo, Senin (26/8).

Bersama Airlangga, tiga Wakil Ketua Komisi VI yang lama juga kembali ditetapkan oleh Pramono mendampingi Erlangga sebagai pimpinan Komisi VI. Mereka masing-masing Aria Bima (F-PDI Perjuangan), Benny K Harman (F-PD), dan Erik Satrya Wardhana (F-Hanura).

Dengan demikian formasi pimpinan Komisi VI tidak berubah. Mereka diusulkan oleh fraksinya masing-masing. Dalam rapat penetapan tersebut, sebelumnya Pramono meminta persetujuan semua anggota Komisi VI. Menurut Pramono, penetapan pimpinan Komisi VI ini sudah sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

Secara terpisah Pramono Anung juga mengukuhkan kembali Pimpinan Komisi IV yang membidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan. Pimpinan Komisi IV yakni Ketua Romahurmuzy (F-PPP), Wakil Ketua Herman Khaeron (F-PD), Firman Subagyo (F-PG), dan Ibnu Multazam (F-PKB).

Sedangkan Wakil Ketua DPR Sohibul Iman Rabu (28/6) saat memimpin Rapat Pemilihan Komisi XI akhirnya menetapkan Olly Dondokambey dari Fraksi PDI Perjuangan dipercaya untuk menjadi Ketua Komisi XI. Olly menggantikan Ketua Komisi XI sebelumnya, sekaligus rekan satu fraksinya, Emir Moeis.



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman menyerahkan palu kepemimpinan kepada Ketua Komisi XI Olly Dondokambey.

Dengan begitu, kata Sohibul, formasi untuk pimpinan Komisi XI yaitu Ketua Komisi XI akan dijabat oleh Olly Dondokambey, dan tiga Wakil Ketua Komisi XI tetap sama, yaitu Andi Timo Pangerang (Fraksi Demokrat) Harry Azhar Azis (Fraksi Golkar) dan Andi Rahmat (Fraksi PKS).

“Kami atas nama pimpinan DPR berharap Komisi XI ke depan semakin produktif dalam melaksanakan fungsi-fungsi dan kedewannya. Baik dari sisi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Kita tahu, kinerja Komisi XI akan semakin baik,” pesan Sohibul kepada seluruh anggota Komisi XI yang hadir. (as, sf), foto : od/parle/hr.

Mesir Harus Segera Keluar Dari Krisis

Situasi keamanan dan politik di Mesir yang sangat kritis telah mengundang keprihatinan Indonesia. Keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Mesir menjadi perhatian khusus. Inilah yang mengemuka dalam pertemuan Duta Besar Mesir untuk Indonesia saat bertemu dengan Ketua BKSAP DPR RI, Surahman Hidayat, Kamis (29/8).

Duta Besar Mesir Baha Dessouki,

menjelaskan, warga Indonesia di Mesir dalam keadaan aman. Jumlah WNI yang tinggal di Mesir per Juli 2013 mencapai 5.026 orang. Mayoritas tinggal di kota Kairo. KBRI sendiri telah membuka 6 posko dan memberi bantuan logistik bagi WNI yang membutuhkan.

Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Wakil Ketua BKSAP Hayono Isman, dan anggota Tantowi Yahya,

Teti Kadi, Linda Megawati, Susaningtyas Nefo Handayani, dan Atte Sugandi. Selain membahas hubungan bilateral kedua negara, pertemuan lebih banyak membicarakan kondisi mutakhir di Mesir pasca-tergulingnya Presiden Mesir Muhammadiyah Mursi.

Ketua BKSAP DPR Surahman dalam kata sambutannya menyampaikan, Mesir harus segera keluar dari krisis



Ketua BKSAP DPR RI Surahman Hidayat menerima Dubes Mesir.

politik. “DPR merasa perlu mengetahui situasi terakhir di Mesir,” katanya. Presiden SBY sendiri, lanjut Surahman, berharap Mesir bisa lebih demokratis dan mampu membangun rekonsiliasi.

Surahman menambahkan, DPR ingin mengetahui langkah-langkah apa saja

yang akan diambil pemerintah Mesir dalam memulihkan situasi. Dalam pertemuan tersebut diputar pula video dokumenter bentrok antara demonstran pendukung Mursi dan militer Mesir. Menurut Dubes Mesir, aksi pendukung Ikhwanul Mesir (IM) telah merusak kantor-kantor pemerintahan.

Para pendukung IM juga telah membakar kantor parlemen.

Akibat bentrok pada tanggal 14-16 Agustus 2013, jumlah korban tewas mencapai 578 orang dan 3.500 orang luka-luka. Informasi versi pemerintah Mesir yang disampaikan Dubesnya untuk Indonesia banyak dikritik dan diprotes anggota BKSAP yang hadir, karena banyak menafikan informasi yang valid dari media-media asing yang melakukan reportase di Mesir sepanjang krisis terjadi.

Namun demikian, hubungan Indonesia dan Mesir yang sangat kuat dan bersejarah tidak boleh ikut hancur karena krisis politik Mesir ini. Baik Dubes Mesir maupun Ketua BKSAP berharap, hubungan kedua negara tetap baik.

(mh) Foto: od/parle.

DPR Bentuk Tim Tuntaskan Masalah Outsourcing Di Lingkungan BUMN



Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning.

Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI akan membentuk Tim Kecil bersama Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pekerja terutama di lingkungan BUMN.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja Outsourcing BUMN Komisi IX dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ruslan Irianto Simbolon yang membahas mengenai penerapan Peraturan Menakertrans Nomor 19 Tahun 2012

tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/8)

“Komisi IX DPR RI bersama Pemerintah, juga akan melakukan sosialisasi pemahaman mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan, sehingga tidak ada penyimpangan dalam implementasinya,” kata Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning saat memimpin rapat tersebut.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Anggota Panja Komisi IX mempertanyakan istilah “outsourcing”, “alih daya” atau “penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan”.

Zulmiar Yanri (F-PD) meminta Komisi IX dan Pemerintah untuk menyamakan persepsi terlebih dulu terhadap penggunaan kata *outsourcing* atau alih daya. Zulmiar menyarankan untuk menggunakan istilah yang ada dalam peraturan perundangan.

“Saya hanya ingin antara kita ini menyamakan persepsi dengan peraturan perundangan yang ada. Sudah berapa kali hal ini saya sampaikan tetapi saya

agak heran juga, Pak Dirjen juga dalam presentasinya tadi menyebutkan beberapa istilah, ada *outsourcing*, ada alih daya, ada penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan,” kata Zulmiar Yanri (F-PD).



Anggota Komisi IX DPR Zulmiar Yanri.

Menurutnya, dalam Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 hanya ada istilah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yaitu melalui pemborongan pekerjaan atau melalui penyedia jasa.

“Kami Komisi IX sudah pergi ke Bali, NTB, hal ini juga menimbulkan kebingungan. Pada PNS juga menimbulkan

kebingungan juga, mereka menggunakan istilah *outsourcing* tapi bukan lima jenis pekerjaan tadi tapi ada 22 jenis pekerjaan. Oleh karena itu, mana yang pemborongan pekerjaan, mana yang penyediaan jasa. Jadi itu dulu pimpinan sebelum terus, kita samakan dulu persepsi,” tegas Zulmiar.

Menjawab pertanyaan Zulmiar, Dirjen PHI dan Jamsos, Ruslan Irianto Simbolon mengakui perbedaan istilah tersebut. Dijelaskan Ruslan, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2011 mengatakan *outsourcing*, kalau Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 masih konsisten

kepada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga atau perusahaan lain.

Dalam komunikasi, kata Ruslan, karena masyarakat sudah tercipta dalam benaknya adalah *outsourcing*, akibatnya akhirnya dalam persepsi pelaksanaannya jadi kacau.

Padahal menurut UU 13/2003 dan Permenakertrans 19/2012, *outsourcing* itu boleh melalui pemborongan atau penyediaan jasa.

Tapi kalau penyedia jasa ini hanya lima, yaitu usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengaman, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan usaha penyediaan angkutan bagi pekerja.

“Walaupun nanti asosiasi memutuskan ada 20 alur pekerjaan yang *non core* atau penunjang, tapi yang lima saja yang boleh melalui Penyedia Jasa Pekerjaan yang lainnya melalui pemborongan pekerjaan. Kami akui itu, kami mohon dan meminta Komisi IX untuk bersama-sama mensosialisasikannya,” papar Ruslan. (sc), foto : od/parle/hr.

DPR Desak Pemerintah Lebih Responsif

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mendesak pemerintah harus lebih responsif menyikapi APBN tahun anggaran 2013, maupun RAPBN 2014. Komisi XI, tambah Harry, berharap supaya angka-angka target di dalam APBN 2013 sedapat mungkin dapat dicapai.

“Kami mendesak pemerintah lebih responsif. Untuk pertumbuhan ekonomi kemungkinan tidak bisa tercapai 6,3 persen, tapi angka optimisnya 6,2 persen. Sedangkan angka pesimisnya Bank Indonesia memperkirakan 5,8 persen. Kalau menurut pemerintah 5,8 persen,” ujar Harry usai rapat kerja tertutup dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Dewan Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, Senin (26/8) malam.

Harry menambahkan, pemerintah memperkirakan akan ada deviasi sebesar 9 persen di RAPBN tahun 2014. Sedangkan, terkait dengan nilai tukar rupiah kurang lebih diperkirakan sebesar Rp 10.000 sampai Rp 10.200. Saat ini nilai tukar rupiah rata-rata berkisar di angka Rp 9800, walaupun saat ini fluktuasi hampir mencapai Rp 11.000.

“Kami tetap meminta supaya langkah-langkah itu diperketat. Rupiah berada di kisaran Rp 10.000 sampai Rp 10.200, kita tetap minta dibawah

itu. Jadi tidak terlalu jauh dari angka APBN 2013 sebesar Rp 9600. Pemerintah juga menyatakan saat ini belum kiris, namun ada indikasi kearah sana (krisis),” lanjut politisi Golkar ini.

Dalam rapat yang berlangsung hingga pukul 23.30 malam ini, Komisi XI juga menyetujui usulan salah satu paket kebijakan ekonomi, yaitu kenaikan pajak barang mewah yang mencapai 125 sampai 150 persen. “Misalnya di tahun ini banyak orang kaya yang membeli jet mewah ataupun mobil mewah, itu layak dikenakan pajak barang mewah sampai 150 persen. Dan itu akan mengurangi spekulasi di nilai tukar,” ujar Harry.

Harry menilai respon pemerintah terlambat menanggapi defisit yang terjadi. Ia menjelaskan defisit terjadi sejak kuartal keempat tahun 2011, sehingga sudah tujuh kuartal terjadi hingga tahun ini. Pada kuartal pertama tahun 2013, defisit sekitar US\$ 5 miliar, kuartal kedua sebesar US\$ 9 miliar. Namun pemerintah belum menjelaskan secara kongkrit perkiraan defisit di kuartal ketiga dan kuartal empat.

“Ya kalau misalnya di tahun 2005 terjadi defisit, itu hanya satu kuartal. Dan tahun 2008 juga satu sampai dua kuartal. Sedangkan sekarang tujuh kuartal berturut-turut, tapi baru responnya agak terlambat. Respon ter-



Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis.

hadap tujuh kuartal tadi kenapa tidak diperkirakan?” tanya Harry.

Lalu bagaimana dengan buruh? Harry menyatakan untuk buruh cukup dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menkeu Chatib Basri sudah menjamin akan memberikan semacam *tax credit* bagi perusahaan-perusahaan yang mampu mempertahankan tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja kepada buruhnya.

“Tadi ada pembicaraan memang dari kalangan pemerintah ada *cash transfer* kepada buruh, tapi itu tidak mungkin karena bisa dianggap membeli suara, karena memasuki tahun politik. Menurut saya juga tidak mungkin,” imbuh Harry.

Harry menyatakan pihaknya akan mengikuti perkembangan ini. Jika dalam satu atau dua minggu mendatang keadaan makin memburuk, kemungkinan Komisi XI akan kembali memanggil pemerintah. (sf), foto : od/parle/hr.

DPR Tunggu Gebrakan Panglima TNI Jenderal Moeldoko

Anggota DPR Tantowi Yahya (F-PG) menyatakan menunggu gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan Panglima TNI yang baru Jenderal TNI Moeldoko. Ditemui sebelum menghadiri Sidang Paripurna DPR, Selasa (27/8) siang, anggota Komisi I Tantowi Yahya yang ikut *fit and proper test* calon Panglima TNI mengatakan, sudah mengetahui rekam jejak, visi dan misinya dalam mengawal dan menjaga keutuhan NKRI dan bertekad menjadikan TNI sebagai militer yang professional.

“Artinya TNI dijamin tidak berpolitik dan netral,” tandas Tantowi.

Selain itu, lanjut dia, dipaparkan oleh Jenderal Moeldoko, tugas TNI adalah menjaga keutuhan wilayah dan yang menarik adalah tekadnya untuk terus meningkatkan kesejahteraan prajurit. “Ini menjadi modal penting. Selain itu akan terus memperkuat alutsista melalui pemaksimalan penggunaan potensi produk-produk dalam negeri,” ungkapnya.

Politisi Golkar ini merasa kagum kepada Moeldoko karena misi dan visi yang disampaikan luar biasa. “Sikap kenegaraan Jenderal Moeldoko melebihi espektasi kita sebagai seorang Panglima TNI. Kalau saya katakan layak sebagai capres itu hanya bercanda supaya suasananya tidak tegang.



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berjabat tangan dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Terutama untuk Pak Moeldoko,” papar Tantowi Yahya menambahkan.

Sementara itu politisi Partai Demokrat Sutan Bathoegana mengatakan, kita tunggu gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan Panglima TNI yang baru Jenderal Moeldoko. “Kita tahu Pak Moeldoko itu professional. Banyak usulan ke Presiden dan diambil satu yang terbaik. Dan sudah melalui berbagai tahapan dan patut diberi ucapan selamat,” tambah Sutan Bathoegana. (mp)/foto:wy, iw/parle.

Daftar Masalah Lapas Sudah di Meja Komisi III



Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf.

Komisi III DPR RI berhasil menghimpun sejumlah permasalahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup dengan Dirjen Pemasyarakatan dan para Kepala Lapas dari seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf kepada wartawan usai rapat di Gedung DPR,

Senayan, Jakarta, Senin (26/8/13).

“Masalah utama memang *overcapacity* kemudian PP 99/2012, kurangnya anggaran operasional lapas, fasilitas lapas dan kurangnya SDM. Rangkaian masalah tersebut sebenarnya tidak terlepas dari lemahnya *integrated criminal justice system* yg tercakup di dalamnya peran Polisi, Jaksa dan Hakim serta Pengacara. Lapas yang kemudian menerima dampaknya,” tandasnya.

Al Muzammil yang memimpin jalannya sidang juga menyebut benang kusut masalah narkoba di tanah air telah membuat semakin banyak para bandar dan pengguna barang haram tersebut yang menyesaki penjara.

“Pengguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi tetapi kemudian dipidana akhirnya memenuhi rumah tahanan dan lapas. Tadi dilaporkan tahanan dan napi narkoba saja meningkat sampai 60%, ini

terbaca dari kasus kerusakan di dua LP di Sumut” lanjut politisi FPKS ini.

Daftar permasalahan yang sudah berhasil dihimpun komisi hukum ini selanjutnya akan dibawa dalam rapat kerja dengan Menkumham yang sekaligus mengundang Menkopolkham dan Menkeu.

“Kehadiran Menkopolkham, Menkeu penting karena permasalahan di lapas khususnya dan sengkaret penegakan hukum secara umum ditentukan oleh politik anggaran kita juga. Ini yang perlu kita sampaikan terutama kepada menko,” imbuhnya.

Rapat gabungan dengan setidaknya 3 menteri menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung ini, dijadwalkan akan berlangsung pada persidangan minggu depan. (iky), foto : od/parle/hr.

Ketua DPR Lantik Anggota Baru PAW Marcus Silanno dan Anwar Sanusi

Ketua DPR Marzuki Alie di Operation Room, Gedung DPR Selasa (27/8) melantik anggota baru pengganti antar waktu (PAW) Marcus Silanno. Marcus menggantikan Suhartono Wijaya dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur I. Selanjutnya pada Kamis (29/8) Ketua DPR juga melantik anggota baru FPP Anwar Sanusi menggantikan H. Endang Sukandar dari Dapil IX Jawa Barat.



Anggota Baru Anwar Sanusi.

Dalam acara yang berlangsung singkat hadir Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan beberapa pejabat Setjen DPR, anggota DPR serta keluarga Marcus Silanno. Dalam sambutannya pada acara pelantikan tersebut Ketua DPR berharap agar anggota DPR mewujudkan janji-janjinya sebagaimana diucapkan saat dilantik. “Para anggota dewan supaya berlaku ikhlas dan jujur dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” ungkapnya.

Saat ditanyai mengenai masa waktu jabatan yang cukup singkat, Anwar Sanusi mengatakan, akan bekerja sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang DPR. “Masih ada waktu kurang lebih satu tahun, saya harus memanfaatkan secara maksimal,” katanya.

“Insya Allah akan lebih fokus ke bidang ekonomi, meski saya juga bersedia untuk ditempatkan di bidang



Anggota baru Marcus Silanno.

lain. Khususnya penanganan masalah ekonomi, prioritas fondasinya harus kuat, baru melangkah. Jangan sampai fondasinya belum kuat kita sudah melangkah. Ibaratnya untuk melangkah selanjutnya harus punya modal dasar,” ia menambahkan. (mp, vp, if) Foto: wy, od/parle.

Perlu Adanya Kesepakatan Baru Terkait Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 2014

Pemerintah menyatakan perlu adanya kesepakatan baru antara DPR dan pemerintah mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 yang lebih realistis dengan mempertimbangkan perkembangan terkini, di mana kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Hal ini berkenaan dengan terjadinya gejolak nilai tukar dan pasar keuangan di *emerging market*, sebagai dampak dari rencana Bank Sentral AS untuk mengurangi ekspansi moneter.

Demikian disampaikan Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Chatib Basri menjawab pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2014 beserta Nota Keuangannya, yang telah disampaikan sembilan fraksi pada Rapat Paripurna sebelumnya, Selasa (20/8).

“Dengan mencermati berbagai perkembangan perekonomian, baik global maupun domestik dan analisis *outlook* satu tahun ke depan, target pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dalam APBN-P 2013 sebesar 6,4 persen perlu dikoreksi ke bawah, dan perlu kerja keras serta langkah-langkah kebijakan penyesuaian untuk mencapainya,” papar Chatib pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara I,



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berjabat tangan dengan Menkeu Chatib Basri. Selasa (27/8).

Chatib menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dalam negeri di tahun 2014 mendatang masih akan dipengaruhi kondisi global yang masih belum menentu. Hal ini disebabkan masih berlarut-larutnya penyelesaian krisis di kawasan Eropa.

“Dalam sistem ekonomi terbuka yang dianut Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional tentunya tidak lepas dari dinamika perkembangan ekonomi global,” ujar Chatib.

Mantan Kepala BKPM ini menambahkan, harga komoditas

dunia juga masih belum tinggi. Sehingga, ekspor, meskipun diperkirakan lebih tinggi dari 2013, belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, yang pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pertumbuhan permintaan domestik.

“Perekonomian dunia pada 2014 diperkirakan masih belum kuat, yaitu tumbuh 3,5 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebesar 3,8 persen,” papar Chatib. (sf), foto: wy, iw, od/parle/hr.

Komisi VII DPR Pertanyakan Dampak Penyuapan bagi Industri Migas



Anggota Komisi VII DPR Mulyadi.

Komisi VII DPR mempertanyakan dampak dan efek psikologis penyuapan yang dilakukan Mantan Kepala SKK Migas terhadap kinerja migas di Indo-

nesia.

“Bagaimana efek kejadian penyuapan di SKK Migas tersebut terhadap kinerja keseluruhan migas,” tanya Anggota DPR Asfihani (F-PD) Saat Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Jero Wacik dan jajarannya, di Gedung Nusantara I, Selasa, (27/8).

Menurutnya, dirinya mengapresiasi positif usulan agar dana operasional SKK Migas di masukkan didalam APBN sehingga pertanggungjawaban menjadi lebih transparan. “Saya merespon dana di SKK Migas jangan dibebaskan begitu saja, dan semua harus dibahas didalam Komisi VII DPR,” ujarnya.

Dia menambahkan, Komisi VII DPR mendukung langkah yang telah

diambil Kementerian ESDM dengan menunjuk Plt Kepala SKK Migas yang baru menggantikan Rudi Rubiandini. “ini menunjukkan langkah cepat agar industri migas tidak terhenti dan ini bukan pekerjaan mudah,” katanya.

Sementara Mulyadi (Fraksi Gerindra) mengatakan, kasus penyuapan Kepala SKK Migas menunjukkan gambaran tata kelola migas di Indonesia yang berantakan. “Kami melihat langkah yang diambil Menteri ESDM sudah cukup baik namun belum memuaskan,” ujarnya.

Dia mengharapkan, tata kelola migas bukan hanya seremonial belaka tetapi langkah tegas bukan hanya *lips service* semata. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Anggota Komisi X Tak Terlibat Kasus Hambalang

Kasus Hambalang kembali santer terdengar usai Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Tahap II, Jumat (23/8) lalu, kepada Ketua DPR Marzuki Alie. Beredar kabar di pelbagai pemberitaan, 15 Anggota Komisi X terlibat dalam kasus ini.

Ketua Komisi X Agus Hermanto menjelaskan pemberitaan keterlibatan 15 anggota Komisi X dalam kasus Pembangunan Pusat Pelatuhan dan sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang pada Kemenpora tidak sesuai dengan LHP.

“Dalam laporan resmi LHP Investigatif Tahap II BPK RI tersebut tidak pernah menyebutkan keterlibatan 15 nama anggota Komisi X DPR RI sebagaimana yang dimuat dalam pem-



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto.

beritaan berbagai media cetak dan elektronik,” jelas Agus dalam *press conference* di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Selasa (27/8) sore.

Komisi X, tambah Agus, pada tanggal 27 Agustus 2013 telah menerima

LHP Investigatif Tahap II BPK RI dan langsung membahasnya dalam rapat internal Komisi X. Agus menyatakan, LHP Investigatif Tahap II BPK RI yang diterima oleh Komisi X bernomor 192/HP/XVI/08/2013 dan bertanggal 23 Agustus 2013.

LHP Investigatif BPK RI itu ditan-datangi dan diberi stempel, serta diparaf pada setiap halamannya. LHP resmi yang diterima Komisi X terdiri dari 108 halaman dan beberapa halaman lampiran. Sedangkan, LHP yang beredar di kalangan wartawan tidak ada stempel BPK dan paraf setiap halamannya.

“Dalam laporan resmi LHP Investigatif Tahap II BPK itu tidak menyebutkan adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Komisi X

dalam proses pembahasan anggaran Kemempora dalam APBN-P TA 2010, APBN TA 2011 dan APBN TA 2012,” ujar Agus.

Politisi Demokrat ini menambahkan,

LHP Investigatif Tahap II BPK RI merupakan tindak lanjut Surat Permintaan DPR RI nomor PW.01/10954/DPR RI/XII/2013 tanggal 16 Desember 2011 perihal audit investigasi terhadap pelaksanaan P3SON Hambalang. Per-

mintaan DPR RI kepada BPK RI untuk melakukan audit, merupakan wujud niat baik sekaligus komitmen untuk melakukan transparansi publik atas kebijakan yang dilakukan oleh DPR RI. (sf), foto : od/parle/hr.

Segera Sosialisasikan Usulan Anggaran SKK Migas Kedalam APBN



Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha.

Komisi VII DPR meminta Pemerintah mensosialisasikan segera usulan untuk memasukkan Anggaran SKK Migas didalam APBN untuk mencegah ter-

jadinya KKN dilembaga itu.

Hal itu terungkap saat Komisi VII DPR mengadakan Raker dengan Menteri ESDM Jero Wacik dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana, di Gedung Nusantara I, Selasa sore, (27/8).

“Saya minta disosialisasikan segera mungkin agar bisa masuk APBN-P 2014 nanti,” kata Anggota DPR Satya W. Yudha dari Partai Golkar.

Menurutnya, memasukkan anggaran kedalam APBN tidak mudah dan perlu kajian mendalam terkait usulan itu. “perlu dikaji antara BKF dan SKK Migas kedepan,” tambahnya.

Dia mengatakan, persoalan suap

di SKK Migas merupakan persoalan bersama yang harus dibenahi. “SKK Migas punya dewan pengawas namun memang secara fisik tidak mengawasi setiap hari karena memang yang diawasi itu kebijakan,” ujarnya.

Dia menambahkan, pengawasan internal seharusnya lebih optimal dan mampu menyikapi bagaimana institusi itu bekerja.

Anggota DPR Milton Pakpahan (F-PD) mengharapkan SKK Migas segera mendiskusikan usulan memasukkan anggaran SKK Migas kedalam APBN dengan Kementerian Keuangan. “Tetapi sebaiknya menunggu RUU Migas nanti sekalian membahas bentuk SKK Migas seperti apa,” tambahnya. (si)/foto: iwan armanias/parle/hr.

Komisi IX Apresiasi Persiapan Pelayanan Kesehatan Haji Kemenkes

Panitia Kerja Kesehatan Haji Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi terhadap persiapan pelayanan kesehatan haji yang telah dilakukan Kepala Pusat Kesehatan Haji, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3L) dan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Binfar dan Alkes) Kementerian Kesehatan.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX, Nova Riyanti Yusuf saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kesehatan Haji dengan Kapus Kesehatan Haji, Dirjen P3L dan Dirjen Binfar dan Alkes Kementerian Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8)

“Semua informasi yang telah disampaikan akan digunakan Panja Kesehatan Haji untuk merekomendasikan perbaikan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji,” kata Nova.

Menurut Nova, Panja Kesehatan Haji bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap persiapan dan juga pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terhadap para jemaah haji, khususnya bagi jemaah haji dengan resiko tinggi, seperti karena usia atau mempunyai riwayat penyakit kronis.

RDP kali ini ditujukan untuk membahas beberapa hal, terutama mengenai kesiapan Pemerintah dalam mengantisipasi penularan virus corona/MERS

pada jemaah haji asal Indonesia.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Kapus Kesehatan Haji, Fidiansjah menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 Tahun 2009 Penyelenggaraan Kesehatan Haji bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan, menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali di tanah air, dan mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh jemaah haji.

Sebagai persiapan penyelenggaraan kesehatan haji di tanah air tahun 2013,



Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf.

telah dilakukan rekrutmen petugas kesehatan haji secara *online* dan melakukan kompetensi di bidang pembekalan yang terintegrasi dengan petugas Kementerian Agama, orientasi dan penguatan Sistem Kesehatan Haji, Advokasi dan kemitraan dengan KBIH/PIHK/AKHI, dan mengintegrasikan sistem informasi SSKOHATKES Kemenkes dan SSKOHAT Kemenag.

Untuk persiapan Embarkasi dan Debarkasi, Kemenkes akan melakukan pemantauan Higine Sanitasi Asrama Haji dan Katering.

“Pembekalan kesehatan dan obat jemaah haji akan disiapkan oleh Ditjen Binfar dan Alkes, dan akan tiba di Arab Saudi pada akhir Agustus 2013,” kata Kapus Kesehatan Haji, Fidiansjah.

Sedangkan persiapan penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, telah dilakukan pengujian aplikasi dan jaringan di tiga daerah kerja yaitu Makkah, Madinah dan Jeddah, pengujian fungsi dan kalibrasi alat kesehatan, serta penyiapan alat pengamanan makanan (Rapid Teset) dan alat ukur Kesling. (sc), foto : od/parle/hr.

Komisi IV Mulai Amandemen UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo berdialog dengan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Komisi IV DPR RI memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, konsekuensi dari *yudicial review* yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sehingga UU ini harus mendapatkan amandemen.

“Ini adalah UU inisiatif Pemerintah, perlu mendapatkan informasi awal sehingga dalam pembahasannya tidak berkepanjangan,” kata Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo, di Gedung DPR, Rabu (28/8), saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Dijelaskan Firman Subagyo, RUU tentang Perubahan atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, didasarkan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUUVIII/2010 dengan Amar Putusan yang memutuskan bahwa Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 Ayat (4) dan (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 Ayat (1), Pasal 71, serta Pasal 75 UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 4739, bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat.

Seluruh Fraksi akan menyampaikan Daftar Inventaris Masalah dari DPR. Dalam rangka itu, Komisi IV selain meminta masukan dari Pemerintah juga akan mengundang Pakar, Akademisi, LSM dan Stakeholder, serta melakukan jaring aspirasi masyarakat untuk meminta pendapat terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk keperluan pembahasan RUU tersebut, Presiden menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM baik bersama maupun sendiri-sendiri. “Mengingatkan bahwa penugasan ini tidak serta merta bahwa Kementerian KKP sendirian,” kata Firman.

Hal tersebut dikatakan karena pengalaman karena kemarin membahas UU Perusakan Kawasan Hutan itu nyaris pembahasan-pembahasan yang rutin dua kementerian enggan hadir atau mungkin tidak dihadirkan oleh kementerian yang menjadi *leading* sektor.

“Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan didalam mengambil keputusan tingkat I nanti, ketika kita ada pembahasan dari kementerian-kementerian terkait itu justru memprotes bahkan mengajukan saran usulan yang telah dibahas hampir final,” tegasnya.

Selain itu, Firman menginginkan supaya terjamin kelancaran ahli bahasa dan ahli hukum hendaknya dipersiapkan agar tidak berganti-ganti. Karena ketika setiap pembahasan ahli hukum dan ahli bahasa itu berganti-ganti maka

pendapatnya akan berbeda, yang akan menghambat proses.

“Dikontrak agar mereka dapat mengikuti alur dari awal sampai selesai. Jangan sampai ditengah-tengah

pembahasan ada pandangan yang berbeda antara pakar hukum itu sendiri dan ahli bahasa itu sendiri,” kata Firman Subagyo dari Fraksi Partai Golkar. (as)foto:wahyu/parle.

Defisit Neraca Perdagangan Ganggu Nilai Tukar Rupiah

Dalam beberapa bulan terakhir, defisit neraca perdagangan Indonesia sangat mengganggu kekuatan nilai tukar rupiah. Melemahnya nilai tukar rupiah juga dipengaruhi faktor global seperti kebijakan yang diambil oleh bank sentral di negara-negara lain dan juga perbaikan pasar di Amerika.

Demikian mengemuka dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kadin, dan Apindo, Rabu (28/8). “Rapat kali ini terasa penting, karena terkait dengan kondisi perekonomian yang sedang bergejolak,” kata Airlangga Hartarto Ketua Komisi VI saat memimpin rapat.



Mendag Gita Wirjawan.

Gejolak yang terjadi akibat melemahnya nilai tukar rupiah saat ini, tentu sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi, terutama meningkatnya inflasi. Komisi VI, kata Airlangga, ingin mengetahui langkah-langkah jangka pendek yang diambil pemerintah untuk memperbaiki neraca perdagangan ini.

“Dari kebijakan yang dilakukan pemerintah ada beberapa hal yang patut menjadi catatan, yaitu kegiatan yang mendorong peningkatan ekspor antara lain kemudahan bagi industri di kawasan berikat untuk dapat meningkatkan ekspor 50%. Ini suatu hal yang perlu diapresiasi,” ungkap Airlangga.



Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Aria Bima.

Namun demikian, ada beberapa permintaan dari kalangan industri agar mendapat kemudahan pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut Airlangga, PPN untuk bahan baku bila direstitusi masih memerlukan waktu dan juga memerlukan biaya bila dibandingkan dengan bahan baku impor. Padahal tahun 2015 kita sudah memasuki ASEAN Economy Community.

Sementara itu, Menperindag Gita Wirjawan, menjelaskan, tanggung-jawab kementeriannya bersama kementerian terkait dan BI adalah menjaga agar tingkat inflasi dapat dikendalikan pada kisaran 7%-8%. Pengurangan impor migas dan peningkatan konten bio diesel yang dilakukan oleh kementerian terkait dan dukungan dari Kemendag akan diukur dari indikator keberhasilan, yaitu impor bisa ditekan sekitar 4-8%.

Sementara neraca perdagangan, lanjut Gita, dapat ditekan pada kisaran USD 5-6 miliar selama tahun 2013. Mendag juga berharap, realitas ini bisa membuahkan surplus neraca perdagangan di tahun 2014 nanti. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

Tenaga Kesehatan Belum Dapat Perhatian

Tenaga kesehatan terutama para bidan dan perawat belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Apalagi remunerasi bagi tenaga kesehatan tersebut juga tidak ada. Banyak para bidan PTT (pegawai tidak tetap)

menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Anggota Komisi IX Okky Asokawati (F-PPP) mengungkapkan hal tersebut kepada Parlemen di ruang

kerjanya, Rabu (28/8). “Yang saya prihatinkan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada tenaga kesehatan. Remunerasi untuk tenaga kesehatan bisa dikatakan tidak ada,” katanya. Padahal saat yang sama pemerintah

akan memberikan dana bantuan operasional bagi lebih dari sembilan ribu puskesmas di daerah.

Dana bantuan operasional itu bisa untuk alat kesehatan dan tenaga kesehatan. Namun, soal status para tenaga kesehatan itu sendiri, hingga kini tidak diperhatikan. Para bidan PTT pernah pula berdemonstrasi di depan istana negara, menuntut diangkat menjadi PNS. Distribusi tenaga kesehatan juga hingga kini belum merata di setiap daerah. Okky menjelaskan, para bidan PTT masa kerjanya 2 kali kontrak, sekali kontrak masanya tiga tahun. Setelah itu nasib mereka tidak jelas.



Anggota Komisi IX Okky Asokawati.

“Karenanya kami di Komisi IX pernah menerima Persatuan Bidan PTT. Mereka berharap statusnya diperjelas.

Akhirnya, dari pertemuan itu dan juga peraturan Menkes, disepakati seorang bidan kalau sudah kontrak kerja selama 2 tahun, maka boleh diperpanjang lagi.” Remunerasi selama ini diberikan pemerintah kepada kementerian/lembaga yang kerjanya kurang baik.

“Remunerasi harusnya diberikan kepada tenaga kesehatan, karena mereka betul-betul bekerja nyata untuk rakyat. Bantuan untuk sembilan ribu puskesmas lebih itu, tidak akan berjalan maksimal kalau remunerasi bagi tenaga kesehatannya tidak diberikan,” keluh Okky. (mh)foto:wahyu/parle.

DPR Desak Pengembalian Dana Nasabah Century Segera Dibayarkan



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century DPR meminta agar pemerintah mencari cara agar segera bisa mengembalikan dana nasabah Bank Century dengan segala upaya.

“Dari meja pimpinan saya betul-betul menganjurkan Pemerintah dengan segala kewenangan yang ada, DPR akan tetap kawal. Para nasabah Bank Century dalam posisi korban, jangan sampai dikorbankan terus. Karena itu kita harus tetap kawal sampai korban nasabah Century mendapatkan hak-haknya.” harap Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ketika memimpin Rapat Timwas Century DPR dengan Tim Pen-

dukung Pengembalian Aset Bank Century di Gedung DPR, Rabu (28/8).

Priyo menegaskan, semua modus baik modus operandi maupun modus-modus lain, yang berkaitan dengan pengembalian dana nasabah Century silahkan digunakan. “Yang penting segera diselesaikan dan segera dibayar,” ujarnya disambut tepukan sebagian nasabah Bank Century yang selalu setia hadir dalam rapat-rapat Timwas Century.

Anggota Timwas Indra dari Fraksi PKS mengatakan, soal pembayaran dana nasabah Bank Century ada di pemerintah, justru Timwas ingin ada pembayaran segera. “Apakah pola melalui aset atau melalui dana yang sudah ada saat ini yaitu melalui Bank Mutiara. Bank Mutiara itu kendalanya ada di eksekutif, di Menteri Keuangan,” ujarnya.

Ditegaskan kembali, saat ini. “bolanya” adalah bagaimana pemerintah mencari jalan melalui aset yang sedang diproses sekian banyak itu. Atau melalui dana yang ada baik di APBN ataupun Bank Mutiara.

Sementara Menkumham Amir Syamsudin selaku Koordinator Tim

Pendukung Pengembalian Aset Bank Century mengatakan, dengan selalu mengaitkan penyelesaian kasus nasabah Antaboga dengan Bank Mutiara dikaitkan dengan berhasil tidaknya penelusuran aset di luar negeri, itu tidak tepat.

Sebenarnya lanjut Amir, Bank Mutiara bisa saja menyelesaikan apakah melalui pola – pola yang ditentukan perbankan dengan para nasabah Antaboga. “Nasabah-nasabah Antaboga ini kan sebenarnya adalah nasabah Bank Century yang berhasil dibujuk untuk memindahkan datanya, karena terbuju agar mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Saya kira sangat manusiawi, tidak ada alasan untuk mempersalahkan mereka,” ungkapnya.

Untuk itu menurut Menkumham, kalau kita selalu ingin menyelesaikan Antaboga dengan menggantungkan harapan kepada penyelesaian atau upaya pengejaran aset Bank Century di luar negeri, sebaiknya dipinggirkan.

“Kalau memang Timwas Century ada keberanian politik untuk melakukan sikap yang berbeda dan tidak selalu menggantungkan hal itu dengan upaya – upaya pengembalian aset, saya kira itu satu hal yang patut dipikirkan,” ujarnya menegaskan. (mp,vp) foto:wahyu/parle

PIA DPR Gelar Halal Bihalal



Halal Bi Halal Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI.

Menjalani talisilaturahmi dapat memperpanjang usia serta menambah rezeki, itulah sepenggal ungkapan Asmawati Marzuki Alie yang disampaikan dalam Halal Bi Halal Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI 1413 H, pada Rabu (28/8) pagi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Selain itu menurut Asmawati, banyak hal yang dapat dipetik dari pertemuan yang dilakukan PIA minimal satu bulan sekali itu. Diantaranya adalah berbagi informasi, pembekalan dan pengembangan diri bagi para anggota PIA sendiri yang notabene berasal dari berbagai daerah dan tingkat pendidikan.

Seperti halnya saat berlangsungnya Halal Bihalal, pada kesempatan tersebut juga diketengahkan peragaan cara berhijab dengan cantik.

“Alhamdulillah, meski sempat tertunda berulang kali karena berbagai sebab seperti masa reses suami, dan hari Kemerdekaan Indonesia. Akhirnya hari ini kami bisa berkumpul kembali dalam acara halal bihalal ini. Pada kesempatan kali ini juga ditampilkan berbagai cara mengenakan jilbab dengan cantik,” jelas Asmawati.

Sementara itu bagi Fenty Priyo Budi Santoso menyatakan, memasuki tahun

politik ini para anggota PIA pastinya disibukan dengan berbagai kegiatan lainnya seperti mendukung suami bersosialisasi di Dapil nya masing-masing. Oleh karena itu ia menyadari bahwa sedikit sekali waktu bagi PIA untuk dapat berkumpul secara utuh.

Meski demikian ia bersyukur para anggota PIA masih tetap menyisihkan waktu untuk dapat berkumpul. Terlebih lagi tidak semua anggota PIA yang suaminya akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Bahkan mungkin yang mencalonkan diri kembali itu tetap akan melenggang menjadi anggota DPR.

“Khusus untuk para anggota PIA yang mungkin tahun depan suaminya tidak mencalonkan diri atau tidak terpilih kembali, maka bukan berarti talisilaturahmi akan terputus. Kami tetap akan kembali berkumpul, namun dengan nama perkumpulan yang berbeda, mungkin saja Alumni PIA atau PIA 2009-2014. Jadi kita tetap akan bersilaturahmi, berbagi informasi dan saling bahu membahu membangun bangsa,” papar Fenty mengakhiri. (Ayu), foto : ry/parle/hr.

Setjen DPR Gelar Apel HUT ke-68 dan Penyematan Satya Lencana Karya Satya

HUT DPR RI ke-68 menjadi momen yang sangat penting, dimana di gedung DPR lah perkembangan demokrasi di Indonesia yang semakin dinamis itu bermuara. Hal tersebut diungkapkan Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti sesaat setelah apel HUT DPR RI pada Kamis (29/8).

“Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi ke-setjenan DPR akan terus mendukung kinerja dewan sebagai sebuah lembaga yang merepresentasikan rakyat,” jelas Win.

Ditambahkannya, meski selama ini ada opini yang berkembang bahwa DPR kurang melahirkan undang-undang, namun dikatakan Win, tugas DPR tidak semata untuk membuat atau melahirkan Undang-undang, melainkan ada tugas lain yang tidak kalah pentingnya.

“Sebagaimana tiga fungsi DPR, legislasi, anggaran dan



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menyematkan Satya Lencana kepada salah seorang karyawan Setjen DPR.

pengawasan. Dimana dari tiga fungsi tersebut tugas DPR tidak semata melahirkan Undang-undang, namun juga ada fungsi atau tugas lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pengawasan dan budgeting. Selain itu tentunya aktivitas DPR lainnya yang langsung bersentuhan dengan rakyat atau masyarakat luas, misalnya menjaring masukan, informasi dan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah,”paparnya.

Selain pengibaran bendera sang saka Merah Putih, dalam apel tersebut juga dilakukan penyematan satya lencana karya satya bagi karyawan DPR RI yang sudah memasuki masa bakti 10 tahun, 20 tahun hingga 30 tahun.

“Tidak secara otomatis karyawan yang sudah mengabdikan selama 10, 20 dan 30 tahun mendapat penghargaan satya lencana karya satya itu, melainkan yang memiliki *track record* atau kinerja yang sangat baik, disiplin yang tinggi dan tidak pernah melakukan pelanggaran serta pasti yang terus menerus mengabdikan atau tidak terputus-putus. Oleh karena itu untuk kali ini penerima satya lencana tersebut jumlah-

nya kurang lebih sekitar 150 orang,” ungkap Win.

Dikatakan Win, apel HUT DPR RI tersebut merupakan bagian kecil dari serangkaian peringatan dan perayaan HUT DPR. Dimana kesetiaan DPR RI juga menggelar Porseni (pekan olahraga dan seni) yang merupakan kompetisi atau lomba olahraga dan seni bagi karyawan kesetiaan DPR, MPR dan DPD. Selain itu juga diketengahkan pameran foto oleh para wartawan yang bertugas di DPR, dan pada puncaknya ditampilkan Pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk dengan Ki Dalang terkenal Ki Anom Suroto.

Berbicara tentang sejarah DPR, 29 Agustus 1945 atau 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan RI, lembaga ini awalnya bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Kemudian sempat berubah menjadi DPRS (Dewan perwakilan rakyat sementara), DPR-GR (Gotong Rpyong) dan akhirnya menjadi DPR, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. (Ayu) Foto:wy, hr, od/parle.

Sekjen DPR Buka Porseni



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti melepas balon sebagai tanda pembukaan Porseni 2013 Setjen DPR, MPR dan DPD.

Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti membuka Pekan Olahraga dan Seni dalam rangka Peringatan HUT ke-68 DPR/MPR RI. Kegiatan Porseni diikuti oleh seluruh biro di DPR, MPR dan DPD serta karyawan instansi yang berkantor di Kompleks Parlemen, seperti Bank Mandiri dan BRI.

Dalam sambutannya, Sekjen yang akrab disapa Win ini menyatakan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan dalam melaksanakan pertandingan. Selain itu, kegiatan ini sebagai momen berharga di Kompleks Parlemen, karena hanya diadakan satu tahun sekali.

“Dengan pertandingan olahraga dan seni, maka akan terbentuk semangat juang yang tinggi. Selain itu, dengan jiwa dan raga yang sehat, maka tugas-tugas pelayanan pada DPR bisa dilaksanakan dengan baik,” pesan Win kepada seluruh peserta Porseni di halaman Gedung Nusantara, Jumat (30/8).

Setelah menyampaikan sambutan, Sekjen melakukan inspeksi mendadak ke seluruh barisan peserta Porseni. Acara dilanjutkan dengan pelepasan balon berwarna merah putih, dan pertandingan tarik tambang di lapangan olahraga.

Porseni akan berlangsung mulai dari 30 Agustus sampai 27 Oktober 2013. Pertandingan terdiri dari sebelas cabang olahraga, dan dua cabang seni. Selain pertandingan olahraga, juga akan dihelat pagelaran wayang semalam suntuk pada 31 Agustus 2013, Pameran Foto Jurnalistik, donor darah, dan kegiatan sepeda santai bersama masyarakat pada 15 September 2013. (sf) Foto: wy/parle.



Pameran Foto Journalistik Parlemen 2013 Bernuansa Betawi

Untuk ketiga kalinya para wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar Pameran Foto Journalistik Parlemen 2013 di lobi Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8). Pameran dibuka oleh Ketua DPR Marzuki Alie, didampingi para wakil Ketua Priyo Budi Santoso, Sohibul Iman dan Taufik Kurniawan, serta dihadiri sejumlah anggota DPR, Ny. Asmawati Marzuki Alie, Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan undangan lainnya.

Yang menarik, acara pameran kali ini bernuansa Betawi, sejak sebelum membuka acara, Ketua DPR Marzuki Alie dan Sohibul Iman diarak dengan kesenian Marawis sambil mendengarkan lagu Kicir-kicir. Sebelum memasuki lokasi pameran, masih disambut lagi dengan aksi beberapa jurus pendelar silat dan sahut-sahutan pantun layaknya upacara pernikahan adat Betawi.

Di sela-sela acara sambutan sebelum membuka secara resmi pameran, panitia juga menampilkan hiburan tari-tarian dari Tim Kesenian Sanggar Setu Babakanan membawakan Tari Lenggang Nyai. Tak ketinggalan dekorasi panggung dilengkapi dengan ondel-ondel dan petasan kertas menandai pembukaan acara.

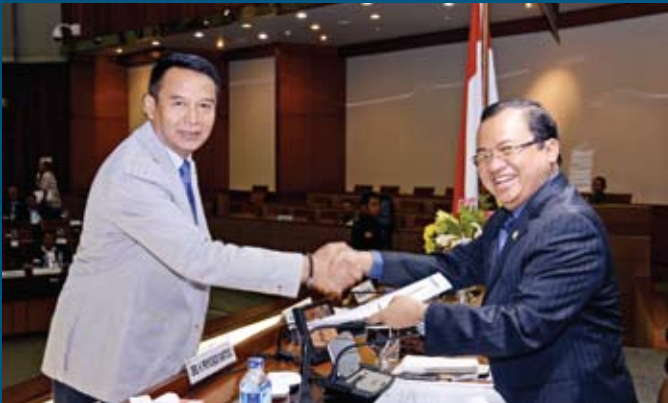
Ketua Panitia Pameran Wahyu Wening menjelaskan, pameran kali ini menampilkan 102 foto dari seleksi foto yang masuk sebanyak 927 dihimpun selama satu tahun. Foto-foto tersebut adalah hasil jepretan wartawan yang sehari-hari aktif meliput kegiatan DPR termasuk dua staf Bagian Pemberitaan DPR. Karya yang ditampilkan adalah kegiatan di dalam maupun di luar gedung DPR.

Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Jaka Soerya mengatakan, pameran foto yang ketiga kalinya ini diadakan di era Kepemimpinan DPR Marzuki Alie. Dia berharap tahun depan bisa diadakan lagi sebab dengan foto ada beberapa hal positif bisa diambil selama menjadi anggota legislatif. “Berita foto juga menampilkan pesan dari suatu kegiatan atau aktivitas anggota DPR secara utuh tanpa bisa dipelintir, berbeda dengan berita yang disajikan secara tertulis,” katanya.

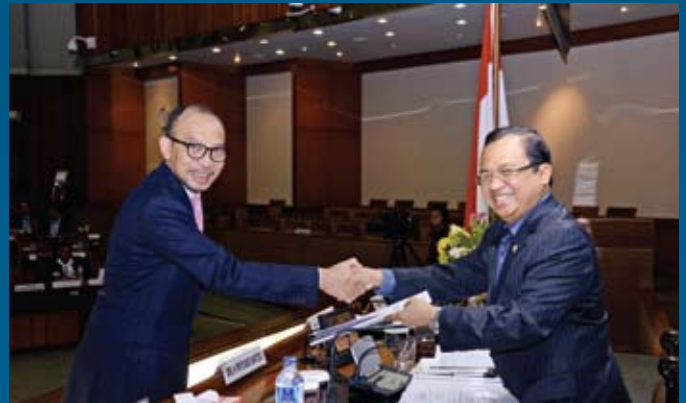
Sementara itu Ketua DPR Marzuki Alie menyambut baik digelarnya pameran foto ini sebab merupakan momen-momen bersejarah yang tidak diketahui para anggota DPR. Foto-foto tersebut juga merupakan wujud demokratisasi sehingga tidak semua yang terjadi di gedung wakil rakyat tersebut harus dipersepsikan negatif. “Banyak persepsi, tetapi kita tidak perlu malu sebab ini merupakan proses sejarah perjalanan bangsa yang harus dilalui,” ungkap Marzuki Alie.

Dalam kesempatan ini Ketua DPR juga mengapresiasi kinerja Biro Humas DPR yang menerbitkan buletin dan majalah Parlementaria serta website DPR-RI. Sebelumnya banyak berita-berita negatif, namun sekarang sudah lebih baik, sudah ada tulisan-tulisan yang sifatnya informatif.

Ia juga bertekad, DPR benar-benar menjadi rumah rakyat, sebagai lembaga yang menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat. “Semua aspirasi yang masuk bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, sementara DPR melakukan pengawasan sehingga aspirasi rakyat tersalur dan ditindaklanjuti serta ada penyelesaiannya,” demikian Marzuki. (mp)/
foto:iwan armanias/parle.



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan panglima TNI dari Wakil Ketua Komisi I TB. Hasanudin, Selasa (27/8).
Foto: Iwan Armanias/Parle.



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berjabat tangan dengan Menkeu Chatib Basri, Selasa (27/8).
Foto: Wahyu/Parle.



Peragaan pencak silat dalam pembukaan Pameran Foto Warna Warni Parlemen 2013, Kamis (29/8).
Foto: Wahyu, Iwan Armanias/Parle.



Pimpinan DPR membubuhkan tanda tangan pada Pameran Foto Warna Warni Parlemen 2013, Kamis (29/8).
Foto: Iwan Armanias, Wahyu/Parle.



Suasana upacara pembukaan Porseni 2013 karyawan DPR, MPR, dan DPD yang dibuka oleh Sekjen DPR Winantuningtyastiti di halaman gedung DPR, Jumat (30/8). Foto: Wahyu, Odjie/Parle.

